



# Laporan Kontekstual

## Daftar Isi

### 1. LATAR BELAKANG

- 1.1 Gambaran Umum EITI
- 1.2 Implementasi EITI di Indonesia
- 1.3 Kerangka Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan EITI di Indonesia

### 2. TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF

- 2.1 Kerangka Hukum Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas), Mineral dan batubara (Minerba)
- 2.2 Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif
- 2.3 Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif
- 2.4 Perubahan dan Perbaikan Tata Kelola yang Sedang Berjalan

### 3. PROSES ALOKASI DAN TENDER WILAYAH KERJA MIGAS DAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERBA

- 3.1 Proses Lisensing di Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- 3.2 Proses Lisensing di Pertambangan Minerba
- 3.3 Pengungkapan Kontrak (*Contract Disclosure*)
- 3.4 *Cadastral Information*
- 3.5 Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

### 4. MANAJEMEN PENERIMAAN NEGARA DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

- 4.1 Penerimaan Negara dan Kebijakan Fiskal yang Berasal Dari Industri Ekstraktif
- 4.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit
- 4.3 Pandangan Umum Industri Ekstraktif
- 4.4 Transfer Penerimaan Pemerintah Pusat yang Berasal dari Industri Ekstraktif kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bagi Hasil - Dana Bagi Hasil (DBH)

### 5. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

- 5.1 Pertambangan Migas: *Abandonment and Site Restoration Fund* (ASR Fund)
- 5.2 Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang
- 5.3 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)

### 6. PENGELOLAAN INDUSTRI EKSTRAKTIF DI INDONESIA

- 6.1 Industri Ekstraktif di Indonesia dalam Konteks Global
- 6.2 Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- 6.3 Industri Pertambangan Mineral dan Batubara
- 6.4 Kontribusi Industri Ekstraktif pada Perekonomian Indonesia
- 6.5 Kegiatan Informal dalam sektor Industri Ekstraktif

### 7. BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI INDUSTRI EKSTRAKTIF

- 7.1 Hubungan BUMN dan Pemerintah
- 7.2 PT Pertamina (Persero)
- 7.3 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
- 7.4 PT. Bukit Asam (Persero) Tbk
- 7.5 PT Timah (Persero) Tbk

#### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR KATA

Lampiran 1: Daftar Peserta dan Pemenang Lelang Wilayah Kerja 2012-2013

Lampiran 2: Rekapitulasi Persetujuan Pengalihan *Participating Interest* Lampiran 3: Ketentuan – Ketentuan Pokok dalam Kontrak

Lampiran 4: Jumlah Kuantitas Ekspor Komoditas Mineral dan Batubara

Lampiran 5: Daftar Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi BUMN

Lampiran 6: Daftar Wilayah Kerja dan Wilayah Pertambangan yang dimiliki BUMN pada tahun 2012 – 2013

# Laporan Kontekstual

## Pending Data

No	Pending Data	Permintaan Persetujuan MSG
Ditjen Minerba		
1.	Data cadangan mineral per daerah	Sementara kami memakai data dari Petromindo
2.	Ketentuan umum dalam kontrak karya/PKP2B	Mohon Konfirmasi dari Ditjen Minerba
3.	Detail produksi Mineral per perusahaan (untuk KK dan BUMN) dan per daerah untuk IUP dari Ditjen Minerba secara total BERBEDA dengan data produksi nasional per komoditas (sumber dari RENSTRA/LAKIP KESDM), dan perbedaannya cukup signifikan .	Mohon klarifikasi Ditjen Minerba data mana yang akan dipakai.
4.	Tidak terdapat laporan kegiatan eksplorasi Minerba dari Ditjen Minerba 2012 dan 2013	Mohon Konfirmasi dari Ditjen Minerba
5.	Detail angka ekspor untuk Batubara dan Mineral HANYA berupa jumlah kuantitasnya saja tetapi TIDAK untuk <u>nilai</u> ekspornya	Data ekspor apakah akan menggunakan data dari BPS (tidak per daerah) atau dari Ditjen Minerba (per daerah)
6.	Peta wilayah pertambangan dan pemilik wilayah pertambangan (data yang dimiliki IA data tahun 2011)	Mohon konfirmasi dari Ditjen Minerba untuk data terbaru

# Laporan Kontekstual

## Pending Data

No	Pending Data	Permintaan Persetujuan MSG
Ditjen Migas		
1.	Peta Wilayah Kerja Migas yang diperoleh IA adalah dari Laporan Tahunan SKK Migas 2013	Konfirmasi dari Ditjen Migas apakah dapat menyediakan untuk tahun 2013
2	EITI 3.10.a The Report must also include an assessment of whether there were any deviations from the license transfers and awards rules in practice.	Untuk memenuhi standar ini kami memerlukan bantuan Tim Pelaksana untuk membuat assessment ini.

Jumlah Perbedaan antara Data Excel Ditjen Minerba (kami gunakan untuk data produksi per daerah) dibandingkan dengan data Rensta/Lakip

Sumber:	Unit	Renstra 2015 (hal. 27)/Lakip		Data excel ditjen minerba		Perbedaan (Kuantitas)		Perbedaan (%)	
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Produksi	Unit								
Logam Tembaga	Ribu Ton	448	450	8,653	1,643	(8,205)	(1,193)	-1832%	-265%
Emas	Ton	75	59	54	68	21	(9)	28%	-16%
Timah	Ribu Ton	95	88	31	24	64	64	67%	73%
Bijih Nikel	Juta Ton	41	60	50	66	(9)	(6)	-22%	-10%
Bijih Bauksit	Juta Ton	30	56	30	52	(0)	4	-1%	7%
Bijih dan pasir besi	Juta Ton	10	19	6	46	4	(27)	39%	-142%

# Laporan Kontekstual

## Perbandingan Data

Tabel I-10 Produksi Mineral Utama Tahun 2010-2014

No.	Komoditas	Unit	Realisasi				
			2010	2011	2012	2013	2014
1.	Logam Tembaga	Ribu Ton	878	543	448	450	416
2.	Emas	Ton	104	76	75	59	67
3.	Timah	Ribu Ton	48	42	95	88	74
4.	Bijih Nikel	Juta Ton	7	32	41	60	3,9
5.	Bijih Bauksit	Juta Ton	16	39	30	56	2,8
6.	Bijih dan Pasir Besi	Juta Ton	4	12	10	19	1,2

## Renstra/Lakip Kementerian ESDM

### Mineral Production by Commodity

Commodity	Unit	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Copper	ton	796,898.00	998,530.37	879,696.85	545,262.70	8,653,408.49	1,643,282.44
2. Copper Concentrate	dmt	2,814,952.00	3,484,133.59	3,466,770.93	2,236,233.00	1,927,239.00	2,351,978.00
2. Gold	kg	118,750.29	128,844.28	104,550.22	76,763.73	54,107.65	68,277.55
4. Tin metal	ton	54,830.34	50,858.96	49,809.94	53,428.04	31,394.00	25,415.75
5. Bauxite	mt	1,152,322.00	783,097.00	15,595,048.83	17,634,896.94	30,281,149.92	51,855,930.53
6. Nickel + cobalt in matte	ton	77,928.00	68,228.35	77,185.88	68,000.04	72,899.00	78,073.80
7. Nickel ore	wmt	6,571,764.00	5,802,260.00	7,522,759.00	15,973,336.85	50,087,747.19	65,979,082.65
8. Ferro nickel	ton Ni	17,566.00	12,550.00	18,688.00	19,690.00	19,578.00	17,026.00
9. Iron sand	wmt	n/a	n/a	n/a	110,951.73	n/a	n/a
11. Iron Ore	ton	n/a	n/a	1,683,960.00	3,294,325.49	6,079,888.98	45,975,502.14

Detail Excel dari Ditjen Minerba

# Laporan Kontekstual

## Data/Informasi yang tidak tersedia di publik

No	Standar EITI	Praktek di Indonesia
1	<p>3.9.b Implementing countries <u>are required to maintain a publicly available register or cadastre system(s) with the following timely and comprehensive information regarding each of the licenses pertaining to companies covered in the EITI Report: i. license holder(s); ii. coordinates of the license area; iii. date of application, date of award and duration of the license; and iv. in the case of production licenses, the commodity being produced.</u></p>	<p><b>Sektor Pertambangan Migas</b> Informasi mengenai peta WK terkini terdapat di laporan tahunan SKK Migas. Akan tetapi, dalam laporan tersebut hanya memuat letak, nama operator, tanggal kontrak, dan status operasi dari suatu WK tanpa merinci mengenai koordinat.</p> <p><b>Sektor Pertambangan Minerba</b> Ditjen Minerba telah mengembangkan website MOMI yang menyediakan informasi kadastral, namun website ini hanya dapat diakses (dalam rangka informasi kadastral) oleh instansi-instansi Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah dan KPK) tertentu sesuai dengan kewenangannya dan tidak dapat diakses oleh publik.</p> <p><b>Pertanyaan kepada Tim Pelaksana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Konfirmasi apakah Kementerian ESDM dapat memenuhi EITI Standard No 3.9.b untuk <i>publicly maintain cadaster system</i>? ATAU</li><li>• Hanya sesuai naratif yang berlaku di seperti diatas?</li></ul>

# Laporan Kontekstual

## Data/Informasi yang tidak tersedia di publik

No	Standar EITI	Praktek di Indonesia
2	3.10.b Where licenses are awarded through a bidding process during the accounting period covered by the EITI Report, the government is required to disclose <u>the list of applicants and the bid criteria</u> .	<p><b>Sektor Pertambangan Migas</b> Dalam laporan EITI 2012 – 2013, IA telah mendapatkan daftar peserta lelang dari Ditjen Migas untuk tender yang dilaksanakan pada tahun 2012-2013. Akan tetapi, Ditjen Migas pada prakteknya hanya mempublikasikan jumlah peserta lelang dan tidak mempublikasikan daftar peserta lelang kepada publik pada saat pengumuman pemenang lelang, baik melalui <a href="http://www.esdm.go.id">www.esdm.go.id</a>, <a href="http://www.wkmigas.com">www.wkmigas.com</a> atau media lainnya.</p> <p><b>Sektor Pertambangan Minerba</b> Pada tahun 2012-2013 terdapat moratorium penerbitan IUP</p> <p><b>Pertanyaan kepada Tim Pelaksana:</b></p> <p>Apakah informasi diatas cukup untuk menjawab EITI Standard No 3.10.b?</p>

# Laporan Kontekstual

## Data/Informasi yang tidak tersedia di publik

No	Standar EITI	Praktek di Indonesia
3	3.11.a It is <u>recommended</u> that implementing countries maintain <u>a publicly available register</u> of the beneficial owners of the corporate entity(ies) that bid for, operate or invest in extractive assets, including the identity(ies) of their beneficial owner(s) and the level of ownership.	<p>Saat ini bursa efek Indonesia mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk mengumumkan pemegang saham utamanya. Publik dapat mengakses laporan tahunan Perusahaan industri ekstraktif yang terdaftar di bursa efek di laman <a href="http://www.idx.co.id">bursa efek (www.idx.co.id)</a>.</p> <p><u>Akan tetapi, pada umumnya pemegang saham utama bukan merupakan pemilik manfaat.</u></p> <p><b>Pertanyaan kepada Tim Pelaksana:</b></p> <p>Apakah informasi diatas cukup untuk menjawab EITI Standard no 3.11?</p> <p>(Pendekatan yang telah disepakati dalam Rapat Tim Pelaksana terdahulu adalah untuk menggambarkan peraturan yang berlaku mengenai <i>beneficial owner</i> dalam Laporan EITI 2012-2013)</p>

# Laporan Kontekstual

## Data/Informasi yang tidak tersedia di publik

No	Standar EITI	Praktek di Indonesia
4	3.12.a Implementing countries are encouraged to publicly disclose any contracts and licenses that provide the terms attached to the exploitation of oil, gas and minerals.	<p>Pengungkapan ketentuan-ketentuan dalam kontrak baik oleh Pemerintah dan Perusahaan masih sangat terbatas. Misalnya untuk kontrak PSC, pengungkapan hanya sebatas <b>tanggal kontrak, periode kontrak dan jumlah komitmen pasti Perusahaan/Joint Venture</b>. Hal ini disebabkan karena Instansi Pemerintah menganggap bahwa kontrak antara kedua belah pihak bukan merupakan informasi publik.</p> <p>Saat ini Tim Pelaksana memutuskan untuk hanya mengungkapkan ketentuan-ketentuan umum dalam kontrak pada laporan EITI 2012-2013</p> <p><b>Pertanyaan kepada Tim Pelaksana:</b> Apakah informasi diatas cukup untuk menjawab EITI Standard no 3.12.a ?</p>

---

# Laporan Kontekstual

## Rekomendasi

- Berdasarkan observasi kami dengan membandingkan standar EITI yang mengharuskan beberapa informasi/data tersedia di publik (*publicly maintain*) dengan ketersediaan data tersebut di publik, kami menemukan beberapa perbedaan (*gap*) yang telah kami gambarkan pada slide-slide sebelumnya, yaitu mengenai informasi kadastral, pengumuman peserta lelang pada saat pengumuman pemenang, pengungkapan pemilik manfaat dan pengungkapan ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
- Mengingat tidak terdapatnya peraturan pelaksana (seperti: Permen) dimana Instansi Pemerintah harus mengikuti standar global EITI dan kesadaran yang memadai dari beberapa instansi pemerintah untuk memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan EITI.
- Kami merekomendasikan agar Tim Pelaksana dapat mendorong Pemerintah untuk mengadopsi standar EITI terbaru dan melakukan sosialisasi dan mendorong Kementerian-Kementerian terkait dalam hal keterbukaan informasi yang disyaratkan oleh ketentuan EITI global.